



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan dinas untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dinas Tahun 2026.

8. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup dinas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun bertujuan untuk :

- a. pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
- b. pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan evaluasi hasil Renja Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (3) Memperhatikan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah menjaga kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026.

Pasal 6

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Tahun 2024;
 - c. BAB III Tujuan dan Sasaran;
 - d. BAB IV Rencana kerja dan Pendanaan; dan
 - e. BAB V Penutup.

- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah secara berkala setiap triwulan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang.
- (4) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis usulan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
 - c. Perubahan RKPD Tahun 2026; dan
 - d. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Agustus 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

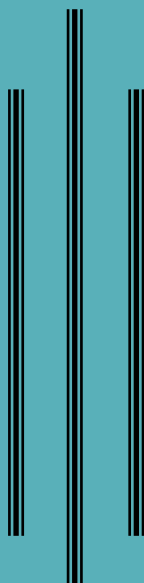


AWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR



**RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT**

Jln. Raya Padang-Bengkulu Km 249, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25674

Laman <https://silautkec.pesisirselatankab.go.id/pos-el>

Email: kecamatanasilaut15@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, atas limpahan rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga Pemerintah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggara tugas-tugas pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
2. Memberikan pedoman dan acuan bagi pengukuran kemajuan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pembangunan.
3. Merupakan petunjuk operasional bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih mikro yang diselenggarakan oleh segenap SKPD termasuk Kecamatan Silaut.

Semoga Rencana Kerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 bisa menjadi sebuah Dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.



Silaut, 17 September 2025
CAMAT SILAUT,

AFLIZEN, S.Sos.
Penata Tk. I / III.d
NIP. 197206051993031005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, merupakan rencana Pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan selama periode Renstra Tahun 2025- 2029 adalah **“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas dan Bersinergi”**.

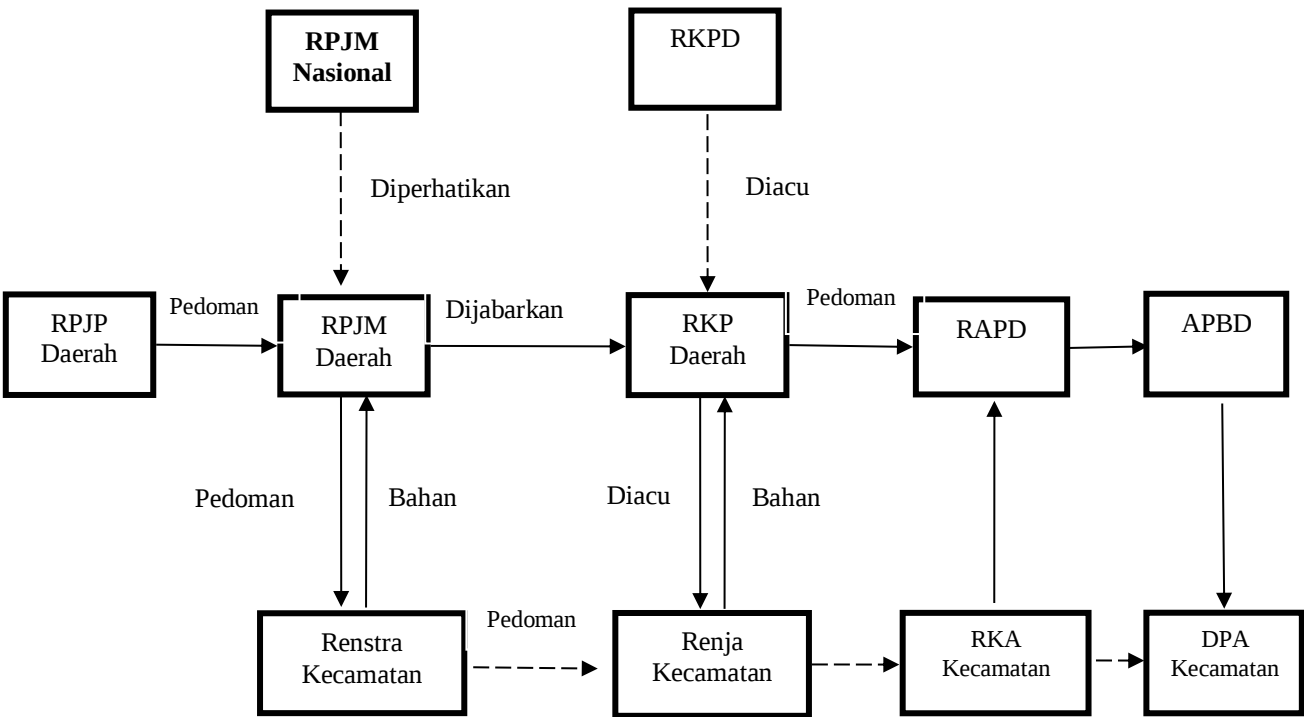
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Pesisir selatan dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026. Hasil perumusan Rencana Kerja disajikan dengan sistematika yang meliputi: pendahuluan, hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu, tujuan dan sasaran, rencana kerja pendanaan dan penutup.

Renja Kecamatan Silaut Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Silaut Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1: Tahapan Penyusunan Renja Kecamatan Silaut Tahun 2026



Renja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut :

a. **Persiapan Penyusunan Renja Tahunan Perangkat Daerah**

Persiapan Penyusunan Renja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan mencakup :

1. Penyusunan rancangan Keputusan Camat Silaut tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Tahunan;
2. Orientasi mengenai Renja Tahunan;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun renja tahunan.

b. Pengolahan data dan informasi

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, yang menyangkut aspek :

1. Kondisi pelayanan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun sebelumnya;
4. Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
6. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
9. Rancangan awal RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;
10. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
11. Data Pokok Pembangunan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan; dan
12. Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

c. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
3. Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024, dan perkiraan realisasi tahun 2025 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2025;
5. Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

d. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun sebelumnya berdasarkan Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;

Adapun review hasil evaluasi mencakup :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
2. Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat

sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;

3. Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
4. Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

e. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dan mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal);
4. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan; dan
6. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

f. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir

Selatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah :

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
2. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

g. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

h. Pengukuran kinerja tujuan dan sasaran;

Pengukuran Kinerja (Performance Measurement) tujuan dan sasaran bertujuan untuk menilai kemajuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

i. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, namun dalam proses ini Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk

perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

j. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dalam pembangunan daerah.

k. Penyajian awal dokumen renja Perangkat Daerah;

Penyusunan dokumen renja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

l. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

m. Penyempurnaan Renja Perangkat Daerah;

Penyempurnaan renja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

n. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan renja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan saran dan masukan dari tim desk renja Perangkat Daerah.

o. Penyesuaian dokumen renja Perangkat Daerah dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen renja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2009 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun tentang Rencana Strategis Kecamatan Silaut Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Kecamatan Serasan Timur ke dalam rencana kerja tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran strategis dan kebijakan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan ke dalam program dan kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2026;
3. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
4. Sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2026;



5. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;

5.1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Pada bab ini menjelaskan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra Kecamatan Silaut, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Daerah serta Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 senilai Rp 2.282.441.339,- (Dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) terdiri dari 5 (lima) program dan 11 (sebelas) kegiatan, realisasi anggaran senilai Rp. Rp2.063.069.664,- (Dua milyar enam puluh tiga juta enam puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah). Untuk menilai kinerja capaian keuangan dan hasil kegiatan, status capaian kinerja dikelompokkan menjadi "Sangat Tinggi" yaitu capaian berkisar antara >90-100%, "Tinggi" yaitu capaian berkisar antara >75-90%, "Sedang" yaitu capaian berkisar antara >65-75%, "Rendah" yaitu capaian berkisar antara 50-65%, dan "Sangat Rendah" yaitu capaian di bawah 50%.

Berdasarkan capaian kinerja keuangan pelaksanaan Renja tahun 2024 terdapat 11 (sebelas) kegiatan yang dengan status capaian "Sangat Tinggi" (90,38%). Untuk capaian kinerja keluaran (*output*) kegiatan semuanya sudah tercapai sesuai perencanaan.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 terlihat pada Tabel 2.1 berikut:



Tabel 2.1
Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025
Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Silaut

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ kegiatan (<i>output</i>)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2024	Realisasi Renja perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01			<u>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</u>	<u>Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten (%)</u>	20	20	20	20	100%	20	60	3
7	01	01	2.01		<u>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	<u>Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)</u>	20	20	20	20	100%	20	60	3



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026

7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	4	7	7	7	100%	7	21	5
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	12	20	20	20	100%	20	60	5
7	01	01	2.02		<u>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</u>	<u>Persentase Tertib Administrasi Keuangan (%)</u>	20	20	20	20	100%	20	60	3
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	168	168	168	168	100%	168	504	3
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12	12	12	12	100%	12	36	3
7	01	01	2.06		<u>Administrasi Umum Perangkat Daerah</u>	<u>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)</u>	20	20	20	20	100%	20	60	3
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1	5	5	5	100%	5	15	15



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026

7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	0	3	0	0	#DIV/0!	0	3	#DIV/0!
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	3	3	3	3	100%	3	9	3
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	2	2	2	2	100%	2	6	3
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dokumen)	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	4	4	4	4	100%	4	12	3
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	12	12	12	100%	12	36	3
7	01	01	2.07		<u>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</u>	<u>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)</u>	20	0	20	20	100%	20	40	2



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026

7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	0	-	0	0	0%	0	0	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	3	-	0	0	0%	3	3	1
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	2	-	5	5	0%	6	11	6
7	01	01	2.08		<u>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	<u>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</u>	20	20	20	20	100%	100	140	7
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	12	12	12	100%	12	36	3
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	4	12	12	12	100%	12	36	9



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026

7	01	01	2.09		<u>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	<u>Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik (%)</u>	20	20	20	20	100%	20	60	3
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	4	4	4	4	100%	4	12	3
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	12	12	12	12	100%	12	36	3
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	2	2	2	2	100%	2	6	3
7	01	02	-	-	<u>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</u>	<u>Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan (%)</u>	<u>88</u>	<u>80</u>	-	-	-	<u>85</u>	165	2
7	01	02	2.04		<u>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</u>	<u>Persentase fasilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (%)</u>	88	70				85	155	2



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026

7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (laporan)	20	4					4	0
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)	4	4	4	4	100%	12	20	5
7	01	03			<u>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</u>	<u>Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan (%)</u>	40	40	40	40	100%	40	120	3
7	01	03	2.01		<u>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</u>	<u>Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan (%)</u>	40	40	40	40	100%	40	120	3
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga)	10	10	10	10	100%	10	30	3



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026

7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	4	4	4	4	100%	4	12	3
7	01	03	2.06		<u>Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</u>	<u>Meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan tingkat kecamatan dan kelurahan</u>	90				#DIV/0!			0
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	90	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0
7	01	04			<u>Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban umum</u>	<u>Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)</u>	80	80	80	80	100%	80	240	3
7	01	04	2.01		<u>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</u>	<u>Persentase fasilitas dan kordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)</u>	80	80	80	80	100%	80	240	3



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026

7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	4	4	4	4	100%	1	9	2
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (laporan)	4	4	0	-	#DIV/0!	0	4	1
7	01	05			<u>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</u>	<u>Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum (%)</u>	80	80	80	80	100%	80	240	3
7	01	05	2.01		<u>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</u>	<u>Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (%)</u>	80	80	80	80	100%	80	240	3
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (orang)	12	12	12	12	100%	12	36	3



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026

7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (dokumen)	4	2	2	2	100%	1	5	1
7	01	06			<u>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</u>	<u>Jumlah nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik (nagari)</u>	75	70	70	70	100%	75	215	3
7	01	06	2.01		<u>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</u>	<u>Jumlah pemerintahan nagari yang dibina dan diawasi (nagari)</u>	75	70	70	70	100%	75	215	3
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (dokumen)	1	4	4	4	100%	1	9	9
7	01	05	2.01	18	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (dokumen)	1	4	4	4	100%	1	9	9

Sumber Data : Kecamatan Silaut 2025

Dari Tabel 2.1 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2024 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan :

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 - h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
 - i. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
2. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Silaut. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau Job Performance dari suatu organisasi yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi dan misi tertentu.

Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja dan Analisa adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, diamanatkan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya, berdasarkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani unsur kewilayahan.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur pelaksanaan pemerintahan umum;

- b. pengoordinasian kegiatan yang urusan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan Kecamatan;
 - 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, meliputi:
 - 1. sinergitas dengan perangkat Daerah yang tugas fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - 1. sinergitas dengan perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan

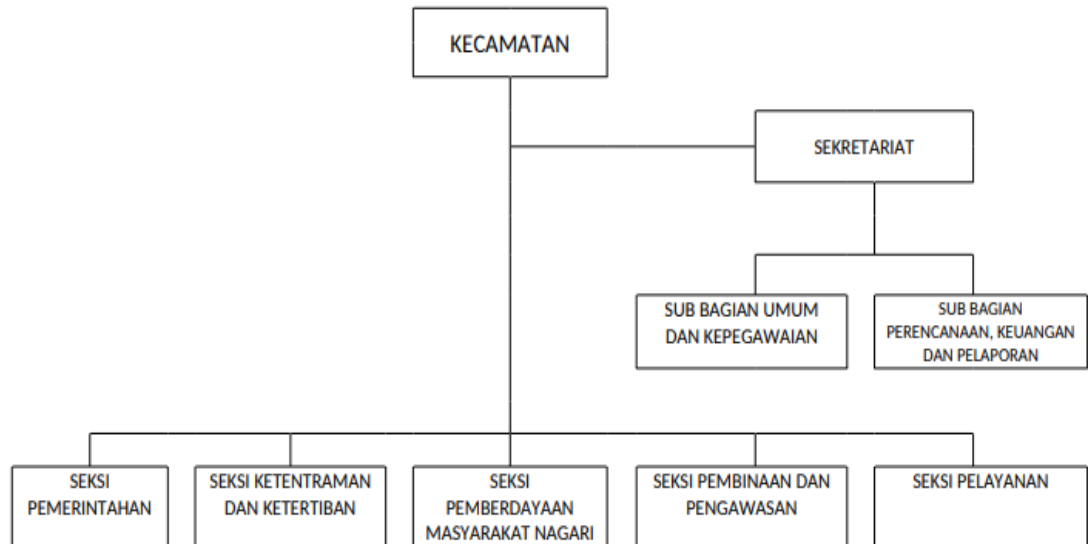
3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur tentang desa; yang
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi:
 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang undangan.

Selain melaksanakan tugas diatas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI PESIR SELATAN
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS
DAN TATA KERJA KECAMATAN

SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN



Gambar 1.1. Susunan Organisasi Kecamatan

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- a. Kecamatan;
- b. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian, terdiri dari:
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nagari;
- f. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
- g. Seksi Pelayanan;

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

A. Kinerja pelayanan di bidang Pemerintahan

1. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat Nagari dan kampung
2. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di seluruh Nagari bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait.
3. Memberikan arahan kepada pemerintahan Nagari untuk membuat peraturan Nagari sebagai payung hukum di tingkat Nagari.
4. Memberikan pembinaan kepada penambangan galian C.
5. Melakukan pembinaan dalam peningkatan PBB.
6. Kerjasama wilayah perbatasan
7. Penataan pelayanan public dan terpadu di Kecamatan (satu) pintu.
8. Pelaksanaan apel gabungan di kecamatan
9. Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti diklat,kursus dalam peningkatan sumber daya aparatur Kecamatan dan Nagari
10. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan dinas instansi terkait di tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.
11. Pembinaan kelengkapan administrasi Nagari dan pendampingan dalam membuat APB-Nagari.

B. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan dengan memfasilitasi, membina, dan memantau kegiatan peningkatan infrastruktur yang berbasis masyarakat (Kemitraan, swadaya murni, UPK, dan lain-lain)
2. Memfasilitasi,membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan, dan peternakan.
3. Pemberdayaan masyarakat pinggir kawasan hutan
4. Fasilitasi pembentukan kelompok HKm (Hutan Kemasyarakatan)
5. Fasilitasi peningkatan produk unggulan Nagari

6. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan.
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta kesehatan.
8. Pembinaan kelompok simpan pinjam dan Program UPK.

C. Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin)
2. Memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah
3. Pelaksanaan Peringatan hari-hari besar Keagamaan
4. Pelaksanaan Peringatan hari Bakti Transmigrasi
5. Monitoring penyaluran Jamkesmas dan Jamkesda
6. Membantu penanganan masalah sosial dan bencana alam
7. Pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait dengan kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3. Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan
4. Persentase Nagari yang Memiliki Administrasi Baik
5. Angka Kemiskinan Ekstrim
6. Prevalensi Stunting (Eppgbm)
7. Persentase Konflik yang Diselesaikan

Berikut dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:



Tabel 2.2
Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Silaut
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	-	A (80,43)	A (81,0)	A (81,0)	A (81,0)	A (80,38)	A (80,38)	A (81,0)	A (81,0)	Realisasi 2024 dan proyeksi 2026-2027 memakai angka target
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	85	87	87	87	85,25	-	87	87	Realisasi 2024 dan proyeksi 2026-2027 memakai angka target
3.	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan			85	89	89	89	87	92	89	89	Realisasi 2024 dan proyeksi 2026-2027 memakai angka target
4.	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	-	-	75%	75%	75%	75%	70%	-	75%	75%	Realisasi 2024 dan proyeksi 2026-2027 memakai angka target
5.	Angka Kemiskinan Ekstrim	-	-	-	0%	0%	0%	0%	-	-	-	Realisasi 2024 dan proyeksi 2026-2027 memakai angka target
6.	Prevalensi Stunting (Eppgbm)	-	-	0	5%	5%	5%	5.15%	-	5%	5%	Realisasi 2024 dan proyeksi 2026-2027 memakai angka target
7.	Persentase Konflik yang Diselesaikan	-	-	80%	82%	82%	82%	80%	-	82%	82%	Realisasi 2024 dan proyeksi 2026-2027 memakai angka target

Sumber Data: Kecamatan Silaut

Berdasarkan data Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2025, realisasi capaian kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah pada tahun 2025 A (81,0) target dan terealisasi A (80,38) atau tercapai 99,23%. Untuk Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Silaut pada tahun 2025 dengan target 89 dan terealisasi 92 atau tercapai 103,37%.

Untuk capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik, Angka Kemiskinan Ekstrem, Prevalensi Stunting (Eppgbm), Persentase Konflik yang Diselesaikan akan dilakukan pengukuran di Triwulan IV Tahun 2025.

Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, namun demikian Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan masih berupaya untuk meningkatkan realisasi kinerja untuk tahun-tahun mendatang..

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Terdapat beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

1) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah :

a. Kecamatan

Permasalahan Kecamatan Silaut dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemahnya atau belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, yang disebabkan:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai;
2. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan;
4. Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi Perkantoran;

5. Perencanaan program dan kegiatan yang belum tepat sasaran sehingga belum terwujudnya pemerintahan yang good governance

Adapun Permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Silaut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Seksi Pemerintahan

- a. Urusan Pencapaian Target PBB-P2 memiliki permasalahan:
 1. Masih banyaknya masyarakat yang tidak membayar PBB-P2.
 2. Keberadaan wajib pajak tidak diketahui keberadaannya. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dalam meningkatkan pelayanan wajib pajak.
- b. Peraturan Nagari, masalahnya:

Masih rendahnya kepedulian Nagari dalam merumuskan dan membuat peraturan Nagari sebagai payung hukum bagi nagari dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.

Upaya yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi kepada pemerintahan Nagari tentang pedoman pembuatan peraturan Nagari.
- c. Masih perlu ditingkatkannya kesadaran Masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- d. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap antisipasi bencana di masing-masing lingkungan;
- e. Kurangnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha;

Upaya yang telah dilakukan adalah :

 1. Mengadakan Sosialisasi secara berkala berkaitan dengan Ketentraman Ketertiban dan Keamanan Wilayah;

2. Meningkatkan kesadaran hukum tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha;

2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan

Adapun Permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi **Seksi Pembinaan dan Pengawasan** adalah:

- a. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM):** Banyak perangkat desa memiliki tingkat pendidikan rendah dan belum memahami fungsi serta tugas secara optimal, termasuk pengelolaan administrasi dan teknologi.
- b. **Koordinasi dan Komunikasi:** Kurangnya komunikasi efektif antar pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, serta lembaga adat menghambat pertukaran informasi dan pelaksanaan program.
- c. **Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat:** Partisipasi dalam musyawarah dan kegiatan desa rendah karena benturan kegiatan adat/keagamaan, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan masih minim.
- d. **Sarana dan Prasarana:** Keterbatasan fasilitas kantor, teknologi, dan infrastruktur pendukung (misalnya pos keamanan) menghambat kelancaran pembinaan dan pengawasan.
- e. **Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa:** Munculnya isu penyalahgunaan dana desa, laporan fiktif, dan belum optimalnya publikasi informasi kepada masyarakat.
- f. **Tantangan Geografis:** Medan sulit dan jarak yang jauh antar desa, terutama di daerah pegunungan, mempersulit monitoring langsung oleh aparat pembina.

Upaya yang dilakukan adalah

- a. **Peningkatan Kapasitas SDM:** Melalui pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi perangkat desa dalam perencanaan, pengelolaan anggaran, dan administrasi desa.
- b. **Optimalisasi Pendampingan:** Pemerintah kabupaten/kota perlu mengoptimalkan program pendampingan desa dan membentuk tim kerja khusus untuk menjamin pembinaan yang efektif.
- c. **Perbaikan Sistem Informasi dan Administrasi:** Menata sistem administrasi desa dan mempercepat publikasi informasi pembangunan (RPJM, RKP, APBDesa) agar lebih transparan.
- d. **Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi:** Mendorong pembentukan wadah aspirasi kelompok masyarakat dan meningkatkan keterlibatan warga dalam perencanaan dan pengawasan.
- e. **Solusi Teknis:** Mengatasi keterbatasan sarana prasarana, seperti penyediaan kendaraan operasional bagi aparat pembina untuk menjangkau desa-desa terpencil.
- f. **Peningkatan Pengawasan Internal:** Peran Inspektorat Kabupaten dalam monitoring dan evaluasi desa anti korupsi perlu ditingkatkan untuk menjaga integritas ASN dan pengelolaan dana desa.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nagari

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan
- b. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Keluarga masih dirasakurang
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi ikut serta mensukseskan pembangunan yang ada di wilayah mereka.

Upaya yang dilakukan adalah

- a. Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah.
- b. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Wali Nagari untuk memaksimalkan peran kader dan institusi Masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaiantarget Keluarga Berencana.

2) Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional

Dalam satu kerangka pembangunan nasional yang terintegrasi, Rancangan awal RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan telah dipaduselaraskan dan diharmonisasikan dengan visi dan misi Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2021-2024 serta visi dan misi gubernur Sumatera Barat dalam rancangan RPJMD Sumbar Tahun 2025-2029.

Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2025-2029 berdampak terhadap capaian program nasional yaitu memajukan kehidupan masyarakat dari semua sektor, seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pariwisata. Pembangunan menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan penggalian sumber daya dalam proses mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri dalam kehidupan masyarakat madani.

3) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Silaut

Tantangan

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas Pemerintahan.
2. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar Dinas Teknis terkait.
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah.

Peluang

1. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah serta pelayanan publik.
2. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan tupoksi Kecamatan.
3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Silaut Tahun 2026 terhadap kebutuhan yang dapat dilihat pada Tabel 2.3. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.



Tabel 2.3
Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Silaut

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Data Renstra Tahun 2025)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Silaut	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten (%)	100	1.871.688.457	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Silaut	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten (%)	100	1.899.398.447	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Silaut	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)	100	12.500.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Silaut	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)	100	9.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Silaut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	4	6.500.000	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kecamatan Silaut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	4	4.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	12	6.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	8	5.000.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Silaut	Persentase Tertib Administrasi Keuangan (%)	100	1.578.482.143	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Silaut	Persentase Tertib Administrasi Keuangan (%)	100	1.451.560.447	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Silaut	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	168	1.523.687.143	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Silaut	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	168	1.358.920.447	



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Silaut	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12	54.795.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Silaut	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12	92.640.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Silaut	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	113.806.314	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Silaut	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	157.300.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Silaut	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1	4.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Silaut	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1	4.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Silaut	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	3	14.806.314	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Silaut	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	3	13.500.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Silaut	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	2	4.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Silaut	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	2	6.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Silaut	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dokumen)		0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Silaut	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dokumen)		1.800.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	1	6.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	1	10.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	4	85.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	4	99.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Silaut	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	57.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Silaut	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	80.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Silaut	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	1	35.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Silaut	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)		45.000.000	



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Silaut	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	4	12.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Silaut	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	4	35.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Silaut	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	8	10.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Silaut	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)		0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Silaut	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	32.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Silaut	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	64.612.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	4	4.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	4	6.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	4	28.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	4	58.612.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Silaut	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik (%)	100	77.400.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Silaut	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik (%)	100	136.926.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Silaut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	4	42.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Silaut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	4	82.926.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Silaut	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	8	5.400.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Silaut	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	8	4.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Silaut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	2	30.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Silaut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	2	50.000.000	



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026

2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Silaut	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan	82	8.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Silaut	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan	82	176.883.300	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Silaut	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (%)	70	8.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Silaut	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (%)	70	176.883.300	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (laporan)	4	4.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (laporan)	30	12.883.300	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)	4	4.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)	4	164.000.000	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Silaut	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan (%)	40	27.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Silaut	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan (%)	40	68.805.500	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Silaut	Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan (%)	40	27.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Silaut	Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan (%)	40	68.805.500	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Silaut	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga kemasyarakatan)	10	7.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Silaut	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga kemasyarakatan)	10	12.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	4	20.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	4	56.805.500	
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Kecamatan Silaut	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	80	3.000.000	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Kecamatan Silaut	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	80	19.000.000	



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Silaut	Persentase fasilitasi dan kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	80	3.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Silaut	Persentase fasilitasi dan kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	80	19.000.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	1	3.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	1	13.000.000	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (laporan)		0	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (laporan)	4	6.000.000	
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Silaut	Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum (%)	80	19.000.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Silaut	Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum (%)	80	28.643.700	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Silaut	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (%)	80	19.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Silaut	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (%)	80	28.643.700	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Silaut	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (orang)	13	15.000.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Silaut	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (orang)	13	22.000.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Silaut	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (dokumen)	1	4.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Silaut	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (dokumen)	1	6.643.700	
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kecamatan Silaut	Jumlah nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik (Nagari)	10	7.000.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kecamatan Silaut	Jumlah nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik (Nagari)	10	56.900.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Silaut	Jumlah pemerintahan nagari yang dibina dan diawasi (nagari)	10	7.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Silaut	Jumlah pemerintahan nagari yang dibina dan diawasi (nagari)	10	56.900.000	



**Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026**

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Silaut	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (dokumen)	1	3.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Silaut	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (dokumen)		6.900.000	
Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kecamatan Silaut	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (dokumen)	4	4.000.000	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kecamatan Silaut	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (dokumen)	4	50.000.000	
Jumlah				1.935.688.457	Jumlah				2.169.630.947	

Sumber data: Rentra dan renja 2026

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *Bottom Up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Nagari, Kecamatan dan tingkat Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Bupati dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan yang mana penjangkaran kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem E-Planning yang diajukan ke Kecamatan Silaut. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Kecamatan Silaut berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2026 dari Para Pemangku Kepentingan pada saat musrenbang tingkat Kecamatan Silaut Tahun 2025 adalah sebagai tabel 2.4. berikut:



Tabel T-C 32 Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Pesisir Selatan

Perangkat Daerah : Kecamatan Silaut

NO.	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB	CATATAN FERIVIKASI	REKOMENDASI (LAYAK/ TIDAK LAYAK)	NILAI (50-100)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Fisik	Rehap Jalan Utama Trans Silaut	Masyarakat Umum	10 Nagari	30 Km	3.000.000.000	Dinas PUTR		Layak	
		Rehap Jembatan di Jalan Poros Utama Trans Silaut	Masyarakat Umum	Jembatan Beli Simpang Talang Binjai, Jembatan beli Pasir Binjai dan sambungo	3 Buah Jembatan (Jembatan Beli Simpang Talang Binjai, Jembatan beli Pasir Binjai dan sambungo)	1.000.000.000	Dinas PUTR		Layak	
		Aspal Jalan SMKN1 Kec. Silaut	Memperlancar transportasi guru, murid dan masyarakat pemukiman	Silaut	300 m	180.000.000	Dinas PUTR		Layak	
		Aspal Jalan dan Gerbang Kantor Camat	Peningkatan transportasi Perkantoran	Silaut	200 m	700.000.000	Dinas PUTR		Layak	
		Pembangunan Jembatan Penghubung Antar Nagari Sambungo dan Air Hitam	Masyarakat	Sambungo Dan Air Hitam	1 Paket	1.000.000.000	Dinas PUTR		Layak	



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026

		pengaspalan jalan ke KUA,DUKCAPI L Dan TK/PAUD	Masyarakat	Sungai Sirah	150 meter	450.000.000	Dinas PUTR		Layak	
		Pengaspalan HOTMIT Jl Penghubung Kabupaten	Masyarakat	Talang Binjai	2,5 Km	6.000.000.000	Dinas PUTR		Layak	
		Lanjutan Aspal Jalan Simpang Polsek-Sungai Pulai	Memperlancar transportasi masyarakat dan kesejahteraan	Silaut - Sungai Pulai	3 Km	1.000.000.000	Dinas PUTR		Layak	
		Normalisasi sungai kewenangan kabupaten	Kesadaran Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	Air Hitam	9 Unit	150.000.000	Dinas PUTR		Layak	
		Penambahan Tiang Listrk dan Lampu Jalan	keamanan dan Perangan sepanjang jalan pemukiman masyarakat	Lubuk Bunta	1 paket	150.000.000	Dinas PUTR		Layak	
		Pagar Puskesmas Tanjung Makmur	Pelayanan Puskesmas Tanjung Makmur		800 M	800.000.000	Dinas Kesehatan		Layak	
		Rumah Dinas Dokter Puskesmas Tanjung Makmur	Pelayanan Puskesmas Tanjung Makmur		1 Unit	300.000.000	Dinas Kesehatan		Layak	
		Pengadaan SARPRAS wisata pantai Sambungo	Masyarakat	Sambungo	2 paket	150.000.000	Dinas Pariwisata		Layak	



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026

		Pembangunan Sarana & Prasarana Pasar dan UMKM	Meningkatkan SDM dalam menggunakan kapasitas teknologi tepat guna	Pasir Binjai	1 Paket	800.000.000	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja		Layak	
		Pembuatan/pengadaan rambu dan marka jalan di simpang 3 pasar silaut	Masyarakat	Sungai Sirah	1 paket	200.000.000	Dinas Perhubungan		Layak	
2	Sumber Daya Manusia	Perbaikan Data DTKS	Pemerintah Nagari Se-Kecamatan Silaut	10 Nagari	10 Nagari	500.000.000	Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		Layak	
		Pembinaan dan Pelatihan Usaha Ekonomi Kreatif dan Usaha Rumahan	Kelompok UMKM	10 Nagari	10 Kelompok di 10 Nagari	100.000.000	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja		Layak	
		Peningkatan Pelatihan Keterampilan Bagi Keluarga Miskin dan Miskin Ekstrim	Kesejahteraan Keluarga Miskin se-Kecamatan Silaut	10 Nagari	Keluarga Miskin dan Miskin Ekstrim di 10 Nagari	500.000.000	Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		Layak	
		Penambahan Kuota BPJS KIS dan APBD	Kesejahteraan Keluarga Miskin se-Kecamatan Silaut	10 Nagari	10 Nagari	500.000.000	Dinas kesehatan		Layak	
		Pelatihan Orang tua /Parenting (Pola Asuh) yang memiliki anak terindikasi Stunting	Peningkatan Kualitas SDM bagi Masyarakat	10 Nagari	10 Paket	300.000.000	Dinas Kesehatan		Layak	



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026

3	Ekonomi	Rumah Pengolahan Susu Kambing	Menumbuhkan perekonomian masyarakat	Durian seribu	1 Paket di Nagari Durian Seribu	1.000.000.000	Dinas peternakan		Layak	
		Penataan dan Perubahan Status kawasan Hutan HPT menjadi Hutan Sosial Nagari	Penyelesaian konflik kehutan dan memberi kepastian hukum bagi masyarakat yang berladang.	silaut	1 paket	150.000.000	Bapedalitbang		Layak	
		Bantuan Pengadaan Bibit, Pupuk, Obat Pertanian Palawija dan Perkebunan Kelapa Sawit/raplating	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	Silaut	1 paket	800.000.000	Dinas Pertanian		Layak	
		Pembangunan Jalan dan Pembinaan Petani Hutan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	Silaut	1 paket	700.000.000	Bapedalitbang		Layak	
		Pengadaan SARPRAS pengelolaan hasil hutan Nagari	Masyarakat	Sambungo	1 Paket	50.000.000	Bapedalitbang		Layak	
		Bantuan pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat miskin	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi bagi Masyarakat	Air Hitam	10 Paket	25.000.000	Bagian Perekonomian SDA Sekretariat daerah		Layak	
		Subsidi listrik bagi keluarga miskin	Masyarakat	Pasir Binjai Dan Sambungo	2 Paket Nagari Pasir Binjai dan Sambungo	159.000.000	Bagian Perekonomian SDA Sekretariat daerah		Layak	

Sumber Data : Musrenbang Kecamatan Silaut Tahun 2025

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sehubungan dengan pelaksanaan Nawacita dimana pelaksanaan pembangunan dari pinggir Kecamatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa/Nagari sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam mewujudkan pembangunan Desa/Nagari, tujuan/indikator yang bisa ditetapkan Kecamatan Silaut adalah:

1. Mengoptimalkan fungsi fasilitasi Pembinaan produk unggul nagari dan pemberdayaan masyarakat
2. Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (pembangunan kawasan pedesaan berbasis ternak sapi bali).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 mengacu pada visi dan misi Rencana Startegis (Renstra) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan serta selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029 adalah:

“PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN”

Penjabaran dan filosofi dari visi tersebut adalah sebagai berikut: Visi ini mencerminkan tekad Pemerintah Daerah dalam membangun wilayah yang memiliki daya saing tinggi, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) **Maju:** Mengacu pada pembangunan yang progresif di berbagai sektor yang berarti Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang modern, pelayanan publik yang prima, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kemajuan juga mencakup peningkatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan teknologi guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
- b) **Tumbuh:** Mencerminkan dinamika pembangunan yang berkelanjutan, progresif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta kemajuan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, “tumbuh” bukan hanya sekadar pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan pembangunan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menandakan adanya perubahan yang positif, berkesinambungan, serta mampu menjawab tantangan zaman demi mewujudkan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.
- c) **Berkelanjutan:** Menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, mengembangkan energi terbarukan, serta menerapkan kebijakan ramah lingkungan, Pesisir Selatan berupaya memastikan bahwa kemajuan yang dicapai hari ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- **“Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas”**. Misi ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Profesionalisme dan integritas menjadi dua pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang melayani masyarakat dengan baik, menjalankan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah. Pemerintahan yang profesional dan berintegritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Profesionalisme dalam pemerintahan mencerminkan tata kelola yang berbasis kompetensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, integritas menegaskan komitmen untuk menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan bebas dari korupsi. Misi ini bertujuan untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tinggi, mengedepankan nilai-nilai etika, serta senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Dengan adanya sistem yang berorientasi pada kinerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, diharapkan pelayanan publik semakin efektif dan efisien. Komitmen terhadap integritas juga menjadi landasan dalam misi ini, dengan menanamkan budaya anti-korupsi serta menerapkan sistem pengawasan yang ketat. Dengan demikian, pemerintahan dapat beroperasi secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
- **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”**. Misi "Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing" merupakan wujud dari komitmen untuk membangun bangsa yang tangguh, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Misi ini bertujuan untuk menciptakan individu-individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga berkarakter kuat,

adaptif terhadap perubahan, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Langkah untuk mewujudkan misi ini meliputi peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penguatan sistem pelatihan vokasi, serta pengembangan soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kerja sama tim. Selain itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kerja keras, dan semangat inovasi sejak dini agar tercipta generasi yang unggul dan berdaya saing. Melalui misi ini, kita berharap terbangunnya generasi yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap menciptakan peluang kerja; generasi yang bukan hanya menjadi penonton, melainkan aktor utama dalam kemajuan bangsa.

- **“Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera”.** Pesisir Selatan memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sentra pangan, Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian serta perikanan. Dukungan terhadap petani dan nelayan melalui teknologi modern, akses pasar yang luas, serta peningkatan infrastruktur pertanian akan menjadi fokus utama. Diversifikasi produk pertanian dan perikanan juga akan didorong guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar nasional maupun internasional. Di sisi lain, sektor pariwisata akan dikembangkan dengan mengedepankan daya tarik alam, budaya, dan kearifan lokal. Pesisir Selatan yang kaya akan keindahan pantai, pulau, dan lanskap alam akan dikelola dengan pendekatan berkelanjutan agar tetap terjaga kelestariannya. Penguatan infrastruktur, promosi wisata, serta peningkatan kualitas layanan dan fasilitas akan menjadi langkah strategis dalam menarik wisatawan. Keseluruhan upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan meningkatnya peluang kerja, berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatnya pendapatan daerah, Pesisir Selatan

diharapkan menjadi daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam mewujudkan misi ini, sehingga Pesisir Selatan dapat terus berkembang sebagai sentra pangan dan destinasi wisata unggul di Indonesia.

- **“Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif”**. Perwujudan misi ini merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang kuat dan bersatu. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan upaya memperkuat nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan gotong royong di tengah masyarakat. Program yang mendorong interaksi sosial yang positif, dialog antar komunitas, serta pelestarian budaya lokal yang inklusif akan terus dikembangkan guna menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Memastikan bahwa tidak ada kesenjangan yang berlebihan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, serta perlindungan hukum yang adil bagi semua, akan menjadi prioritas dalam mewujudkan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan.
- **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana”**. Pesisir Selatan Selatan merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan keindahan lingkungan, namun juga memiliki tantangan besar terkait perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta risiko bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam, meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Mengacu kepada Visi, Misi serta Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang berhubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan adalah: Misi ke 1 (Satu) yaitu: **“Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas”**,

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 maka tujuan yang hendak dicapai yaitu:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi.”

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator outcome yang terukur. Dalam perumusan Sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja Sasaran yang akan diukur. Sasaran yang hendak dicapai dalam peningkatan pelayanan publik tahun 2026 yaitu:

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan.
- b. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan.
- c. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.
- d. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat KecamatanMeningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Tahun 2025
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi.	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,0)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	89
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	75%
			Angka Kemiskinan Ekstrem	0%
			Prevalensi Stunting (Eppgbm)	5%
2.	Terciptanya kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenang dan Dinamisin.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	82%

3.3. Program Dan Kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dalam Renja 2025 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Bupati Pesisir Selatan.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan tahun 2025:

Jumlah Program : 6 (Enam)
Jumlah Kegiatan : 11 (Sebelas)
Jumlah Sub Kegiatan : 25 (Dua puluh lima)



Pagu Indikatif APBD : Rp 1.935.688.457,- (*Satu milyar Sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah*).

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah.
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
5. Fasilitas Kunjungan Tamu.
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik:

Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

Sub Kegiatan:

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan.
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

III. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa:

Kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Sub Kegiatan:

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
2. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

IV. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Sub Kegiatan:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.



V. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Sub Kegiatan:

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

VI. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
2. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.



Uraian rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel T-C.33. Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026 (Data Renstra 2026)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN							2.214.326.697				0		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2.104.671.697				0		
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							13.341.840				0		
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	4 Dokumen	100 %	6.956.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	20 Laporan	100 %	6.385.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026

7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.730.845.857					0
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tertibnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	168 Orang/bulan	12 bulan	1.676.055.857	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tertibnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	12 bulan	54.790.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								130.362.000					0
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tertibnya administrasi umum Perangkat daerah yang baik	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	2 Paket	12 bulan	1.988.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tertibnya administrasi umum Perangkat daerah yang baik	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	3 Paket	12 bulan	22.474.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tertibnya administrasi umum Perangkat daerah yang baik	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	2 Paket	12 bulan	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026

7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tertibnya administrasi umum Perangkat daerah yang baik	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	1 Dokumen	12 bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tertibnya administrasi umum Perangkat daerah yang baik	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	1 Laporan	12 bulan	9.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertibnya administrasi umum Perangkat daerah yang baik	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	12 bulan	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							94.500.000	0					
7	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	1 Unit Sepeda Motor	1 unit	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	2 Unit Printer, 2 Unit Laptop	4 unit	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026

7	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	1 Unit tempat tidur, 1 Set Kursi Tamu, 1 Unit AC	3 unit	14.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								31.532.000				0	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	4 Laporan	12 bulan	4.532.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	4 Laporan	12 bulan	27.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								104.090.000				0	



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026

7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	4 Unit	12 bulan	63.690.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	12 Unit	12 bulan	5.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	2 Unit	12 bulan	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							13.410.000				0		
7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							13.410.000				0		



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026

7	01	02	2,04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah MTQ yang diikuti Jumlah remaja mesjid yang aktif Persentase Mesjid yang melaksanakan subuh berjamaah Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Terselenggaranya urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat di kecamatan silaut	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Semua Kelurahan				3.410.000					
7	01	02	2,04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah MTQ yang diikuti Jumlah remaja mesjid yang aktif Persentase Mesjid yang melaksanakan subuh berjamaah Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terselenggaranya urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat di kecamatan silaut	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	85 Tanpa Satuan	1 Laporan	12 Bulan	10.000.000					
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								32.400.000					0
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								32.400.000					0



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026

7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di nagari	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut		10 Lembaga	2 Bulan	12.400.000					
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di nagari	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut		1 Laporan	12 Bulan	20.000.000					
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								7.530.000					0
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								7.530.000					0
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut		1 Laporan	12 Bulan	3.765.000					



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026

7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut				3.765.000					
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								33.915.000					0
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								33.915.000					0
7	01	05	2,01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut		12 Orang	12 Bulan	29.415.000					
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut		1 Dokumen	12 Bulan	4.500.000					
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								7.400.000					0
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								7.400.000					0



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026

7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik Jumlah Penetapan Kawasan Perdesaan yang difasilitasi	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Adminstrasi Pemerintahan Nagari	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut		1 Dokumen		4.200.000					
7	01	06	2,01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik Jumlah Penetapan Kawasan Perdesaan yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Adminstrasi Pemerintahan Nagari	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut				3.200.000					

Sumber Data : Renstra kecamatan silaut Tahun 2025-2029

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Silaut. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Kecamatan Silaut kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Kecamatan Silaut. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Silaut.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:



Tabel 4.1
Tabel TC-27 (data dari sipd)

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output dan Kegiatan Output)	Data Pencapaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
										Target	Rp		
1	2	3	4				5	6	7	10	11	20	21
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten (%)		100	16.915.113.180	Kec. Silaut	
			7	01	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)		100	13.033.700	Kec. Silaut	
							Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)		4	7.039.900	Kec. Silaut	
							Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)		8	5.993.800	Kec. Silaut	
			7	01	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan (%)		100	16.510.859.283	Kec. Silaut	



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026

				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)		168	16.444.619.283	Kec. Silaut	
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)		12	66.240.000	Kec. Silaut	
7	01	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		100	135.640.070	Kec. Silaut	
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)		1	1.930.759	Kec. Silaut	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)					
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)		3	16.527.567	Kec. Silaut	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)		2	5.431.744	Kec. Silaut	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (dokumen)					



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026

				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (laporan)		1	9.900.000	Kec. Silaut	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)		4	101.850.000	Kec. Silaut	
7	01	01	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		100	117.485.700	Kec. Silaut	
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)		1	38.087.000		
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)		4	39.958.700	Kec. Silaut	
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)		8	39.440.000		
7	01	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		100	60.714.427	Kec. Silaut	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang		4	4.326.000	Kec. Silaut	



Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik							Disediakan (laporan)				
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	4	56.388.427	Kec. Silaut	
		7	01	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik (%)	100	77.380.000	Kec. Silaut	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	4	42.000.000	Kec. Silaut	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	8	5.400.000	Kec. Silaut	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	2	29.980.000	Kec. Silaut	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan	85%	39.464.120	Kec. Silaut	



		7	01	02	2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (%)		70	39.464.120	Kec. Silaut	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (laporan)			3.539.000		
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)			35.925.120		
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Jumlah nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik (Nagari)		10	6.595.000	Kec. Silaut	
		7	01	06	2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintahan nagari yang dibina dan diawasi (nagari)		10	6.595.000	Kec. Silaut	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (dokumen)		1	3.655.000		



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026

	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan					Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Fasilitas Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (dokumen)		1	2.940.000	Kec. Silaut	
			7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan (%)		40	49.930.464	Kec. Silaut	
			7	01	03	2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan (%)		40	49.930.464	Kec. Silaut	
							Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga kemasyarakatan)		10	7.695.000	Kec. Silaut	
							Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)		1	42.235.464	Kec. Silaut	
Terciptanya kondisi masyarakat Pesisir Selatan yang aman,	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	7	01	05		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)		80%	2.145.000	Kec. Silaut	



tenteram dan
dinamisin

7	01	05	2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase fasilitasi dan kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)		80%	2.145.000	Kec. Silaut	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)		1	2.145.000		
				Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (laporan)			0		
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum (%)		80	31.371.519	Kec. Silaut	
7	01	05	2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (%)		80	31.371.519	Kec. Silaut	



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026

						Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (orang)			24.712.519		
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (dokumen)		1	6.659.000	Kec. Silaut	
JUMLAH										2.244.619.283		

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas, fungsi, serta program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2026. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keterpaduan antara kebijakan pembangunan daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah, sehingga arah pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, dan selaras dengan visi, misi, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah.

Selain memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2026, dokumen Renja ini juga menggambarkan kebutuhan pendanaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah serta menjadi acuan dalam proses penganggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah ini dilakukan dengan memperhatikan berbagai dokumen perencanaan yang lebih tinggi, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya. Selain itu, penyusunannya juga mempertimbangkan berbagai faktor strategis yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal, seperti dinamika kebijakan pemerintah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, perkembangan regulasi, kemampuan fiskal daerah, serta isu-isu strategis yang berkembang dan berpotensi memengaruhi pelaksanaan pembangunan daerah.

Meskipun telah disusun secara sistematis melalui proses perencanaan yang komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, substansi Dokumen Renja ini tetap bersifat dinamis dan dapat mengalami penyesuaian apabila terdapat perubahan kebijakan nasional maupun daerah, perubahan kondisi strategis, keadaan kahar (*force majeure*), maupun hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan yang mengharuskan

adanya penyempurnaan. Setiap perubahan tersebut akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tetap menjamin konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan pembangunan daerah.

Demikian Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah selama satu tahun anggaran. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 2026

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI

KERTAS KERJA
VERIFIKASI RENCANA KERJA (RENJA) PD
TAHUN 2026

Nama OPD : Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
 Nama Verifikator : Yulita Busrali, S.E., M.M

CATATAN HASIL VERIFIKASI

No.	Materi Verifikasi	Catatan Hasil Koreksi/Saran/Masukan Perbaikan	Halaman
I	Kelengkapan dokumen Renstra berupa : - Isi dokumen dari Bab 1-5	1. Dokumen Renja Kecamatan Silaut sudah memuat 5 BAB berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Peraturan ini mengatur pedoman untuk menyusun, mengevaluasi, dan mengubah dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);	
II	Kesesuaian isi narasi per Bab berdasarkan berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017	Isi narasi dari bab 1 s/d 5 ada perbaikan yang disesuaikan dengan berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut : 1. BAB I : Pada 1.1 Latar belakang: sudah memuat pengertian Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra dengan Renja K/L dan Renja Provisi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Pada 1.2 Sudah Memuat UU, PP, Perda dan ketentuan peraturan lainnya Pada 1.3 Sudah memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Pada 1.4 sudah memuat pokok bahasan erta usulan garis besar isi dokumen 2. BAB II : Urutan sub BAB pada BAB II sudah Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun	

No.	Materi Verifikasi	Catatan Hasil Koreksi/Saran/Masukan Perbaikan	Halaman
		2017 hanya ada perbaikan sedikit pada sub BAB sesuai aturan yaitu: 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan capaian renstra PD Tabel T-C.29 sudah sesuai aturan Permendagri 86 Th.2017. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah SOTK sudah berdasarkan Perbup terbaru Tabel -C.30 sudah sesuai dengan Permandagri 86 Tahun 2017 2.3 Isu isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD sudah sesuai dengan Permandagri 86 Tahun 2017 2.4 Review terhadap Ranwal RKPD sudah sesuai dengan Permandagri 86 Tahun 2017 2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat sudah sesuai dengan Permandagri 86 Tahun 2017 3. BAB III sudah sesuai dengan Permandagri 86 Tahun 2017 4. BAB IV sudah sesuai dengan Permandagri 86 Tahun 2017 5. BAB V sudah sesuai dengan Permandagri 86 Tahun 2017	
III	Keterkaitan antar Bab dalam dokumen	Saling keterkaitan antar BAB I sampai dengan BAB V	

Painan, 17 Desember 2025



Koordinator Pengampu,
FADLI AMRA, S.H., M.M.
 NIP. 19761006 199403 1 001

Verifikator,

Pengampu,


Yulita Busrali, S.E., M.M
 NIP. 19770724 200901 2 001